

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- Alirman, N. (2016). Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu). *Jom Fisip*, 3(2), 11.
- Amanda, P. I. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 34–38.
- Di, A., & Kependudukan, D. (n.d.). Daring Dalam Meningkatkan Tertib Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
- Fatkhul Muin. (2014). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah. *Fiat Justisia Jurnal*, 8(1), 69–79.
- Hamidi.2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM press.
- Istiqomah, E., & Setyobudihono, S. (2017). Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenous. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 5(1), 1.
- Jenanu, K., & Nanang, B. (2019). Program Inovasi Gampil (Gesit, Aktif, Merakyatnya Disediakan) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Akta Kematian (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 42–47.
- Juwita, M. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pencatatan Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*, 06(01), 1–17.
- Kadafi, M., Khadijah, H., & Syaputra, M. S. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Dokumen Keluarga Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Desa Senaru. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 39–43.
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569–586.
- Kusumadinata, A. A., & Fitriah, M. (2017). Strategi Komunikasi Pelayanan Publik melalui Program Pos Pemberdayaan Keluarga. *Jurnal ASPIKOM*, 3(1), 225–238.

- Mohi, W. K., & Mahmud, I. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 102.
- Naqibah, L. S., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Service (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang). *Jurnal Respon Publik*, 15(9), 22–30.
- Puspitasari, N. L. P., & Bendesa, I. K. G. (2016). Public Service Quality Analysis at Badung Regency Integrated Licensing Service Agency. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(1), 89–114.
- Rika, D., Purwanti, D., & Amirulloh, R. (2022). Efektivitas pelayanan pembuatan akta kematian pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* , 11(1), 104–113.
- Suandi, S. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. *Journal PPS UNISTI*, 1(2), 13–22.
- Suhartoyo, S. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 143–154.
- Syafie, I. K. (2015). Landasan Teori Implementasi Kebijakan. 13, 21.
- Syafiie. (2018). Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Pemerintahan. 5–8.
- Wicaksono, K. W. (2019). TIPOLOGI INOVASI SEKTOR PUBLIK PADA TIGA PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 196.
- Yayat, R. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, 56–65. Pdf
- Peraturan Walikota Malang nomor 89 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
- Krida Sadhana, Kridawati, 2011, Realitas Kebijakan Publik, UMM.Press Malang.

- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi penelitian kualitatif, bandung: remaja rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek.
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2004. Metode penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Hadi, Sutrisno. 1986. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi offset.
- Sugiyono. 2010. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Rully dan Poppy. 2016:136 Metode Penelitian. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono. (2000) Metode Penelitian.
- Saryono, 2010. Metode Penelitian kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian.
- Koentjaraningrat. 2008. Metode Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia. Jakarta
- Budi Winarno. 2012. Kebijakan public: Teori, proses, dan studi kasus.
Yogyakarta: CAPS
- Sholahuddin, Agus. 2021. Metodologi Penelitian Sosial: Prespektif Kualitatif-kuantitatif. Malang: Edulitera.